

## ANOMALI POLA ASUH: KERATON YOGYAKARTA, 1921-1939

Mutiah Amini

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

---

### ABSTRACT

This paper is a historical study of the shifting of parenting pattern in Keraton Yogyakarta during Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. In the custom of the family life in Keraton Yogyakarta, especially for the royal family, a newborn child was cared by parents and housekeepers (mbok mban/abdi dalem). However, the changes was happened in the period of Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. The Dependency of chain parenting against house aids was changed through storage sons of kings in the European family. In this condition, the anomaly was happened because in the midst of the parenting, Sultan is responsible to maintaining and reproducing the Javanese culture in the palace. Because of that, Sultan would entrust to the European family upbringing. This condition is certainly vulnerable to the overall sustainability of Javanese culture.

Keywords: parenting, child, Keraton, Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono VIII, abdi dalem

### ABSTRAK

Tulisan ini merupakan kajian historis terhadap pergeseran pola asuh yang terjadi di Keraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Suatu kebiasaan dalam kehidupan keluarga Jawa, terutama dalam keluarga keraton bahwa seorang anak yang baru lahir selain diasuh oleh orang tua juga diasuh oleh pembantu rumah tangga (mbok mban/abdi dalem). Akan tetapi, perubahan pola asuh terjadi pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Rantai ketergantungan pola asuh terhadap pembantu rumah tangga diubah melalui penitipan putra-putra raja pada keluarga Eropa. Dalam kondisi inilah anomali pola asuh kemudian terjadi. Ini terjadi karena di tengah-tengah tanggung jawab Sultan untuk tetap mempertahankan dan mereproduksi budaya Jawa di dalam lingkungan keraton, ia justru mempercayakan pola asuh pada keluarga Eropa, yang pada akhirnya memberikan pengaruh yang tidak sedikit pada keberlangsungan kebudayaan Jawa.

Kata kunci: pola asuh, anak, keraton, Yogyakarta, Sri Sultan HB VIII, abdi dalem

## PENDAHULUAN

Keraton merupakan contoh pengembangan budaya Jawa yang paling utuh. Dari keraton inilah budaya Jawa dipelajari dan dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat umum. Moedjanto mencatat bahwa segala hal yang terjadi di dalam lingkungan keraton merupakan rujukan yang paling utama dari masyarakat Jawa (Moedjanto, 1987). Dengan memfokuskan kajian pada kehidupan keraton, tulisan ini diharapkan dapat merepresentasikan perubahan budaya Jawa secara keseluruhan. Dalam hal ini, representasi budaya Jawa yang dilihat adalah pada perubahan pola asuh di lingkungan keluarga sultan di keraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono VIII. Sultan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang menempati strata paling atas. Pada lapis kedua adalah kerabat keraton atau sentana dalem. Lapis ketiga adalah abdi dalem, yaitu mereka yang bekerja pada administrasi kasultanan. Lapis keempat adalah wong cilik (Surjomihardjo, 2000:27). Di satu sisi keraton perlu melestarikan budaya Jawa yang berkembang. Di sisi lain, keraton juga telah bersentuhan dengan pemerintahan kolonial, yang memaksanya untuk menyesuaikan dengan budaya Eropa.

Ikatan politis keraton dengan Eropa (pemerintah kolonial Belanda) dimulai ketika Hamengku Buwono VII naik tahta pada tahun 1877. Ketika diangkat, raja harus tunduk pada ketentuan *Gubernemen* terkait dengan beberapa hal, baik di bidang keamanan, infrastruktur jalan, maupun sistem kerja di bidang agraria. Demikian pula dalam hal keuangan, pemerintahan kolonial mempunyai kekuasaan untuk mengatur keuangan keraton. Kondisi ini kemudian mulai melenur ketika Hamengku Buwono VIII naik tahta. Ketika itu, keraton diberikan keleluasaan untuk mengatur keuangan di dalam lingkup istana, sekalipun keuangan yang ia pergunakan berasal dari sumber yang sama, yaitu dari pemerintahan kolonial (Poerwokoesoemo, 1985: 38).

Secara historiografis, memfokuskan

kajian pada kehidupan keraton harus dikaitkan dengan kajian-kajian terdahulu. Kajian yang memfokuskan pada birokrasi, misalnya, telah ditulis oleh F.A. Sutjipto (1978), G.P. Rouffaer (1931), Soemarsaid Moertono (1985), Soedarisman Poerwokoesoemo (1985), Ricklefs (1974), dan Selo Soemardjan (1978). Seluruh kajian tersebut memberikan perhatian pada interaksi politik-kultural di dalam keraton. Sayangnya pola asuh belum menjadi perhatian penting dalam tulisan-tulisan tersebut. Kecenderungan yang sama tampak pula pada kajian tentang keraton yang fokus pada permasalahan budaya, seperti permasalahan busana yang dilakukan oleh Mari S. Condronegoro (1995) dan Sukmawati (2004), serta kajian tentang tari yang dilakukan oleh Dwi Hadiyanto Wicaksono (1999). Sama dengan kajian tentang birokrasi, kajian-kajian tersebut lebih fokus pada kehidupan kelas elit di istana.

Kajian tentang dunia keraton tanpa seutuhnya memfokuskan pada kelas elite, tampak pada kajian Darsiti Soeraman (2000) di Kasunan dan Ageng Pangestu Rama (2007) serta Atmakkusumah (ed.) (1982) tentang keraton Yogyakarta. Di dalam kajiannya ketiga tulisan tersebut mulai melihat sisi lain dari kehidupan elite istana. Ketiganya mulai mencermati kehidupan masyarakat di sekitar istana dengan tidak melepaskan diri dari kehidupan keluarga pangeran. Masyarakat sebagai unsur penting dalam kehidupan istana mulai dilihat di dalam ketiga kajian tersebut. Sekalipun demikian, pola asuh belum menjadi fokus dari kajian terdahulu. Karena itu, tulisan ini secara spesifik memfokuskan pada perubahan pola asuh yang terjadi pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Sultan memotong rantai ketergantungan pola asuh pada keluarganya. Kondisi ini merupakan sebuah anomali. Di satu sisi keraton menjadi pusat rujukan budaya Jawa, sementara itu di sisi lain putra-putra raja yang bertanggung jawab menjaga dan mengembangkan budaya Jawa justru ditiptkan dan diasuh secara langsung oleh keluarga Eropa. Karena itu menjadi

menarik untuk mendiskusikan, pola asuh seperti apakah yang kemudian direproduksi oleh para putra keraton di dalam keluarga-keluarga Eropa serta strategi seperti apakah yang dibangun oleh sultan maupun putra-putranya supaya budaya Jawa tetap berkembang secara utuh di lingkup keraton.

## **POLA ASUH KERATON**

Di dalam dunia keraton, pedoman tentang pola asuh tertuang secara lengkap dalam berbagai serat piwulang. Piwulang *warna warni*, misalnya, memuat tentang pola asuh dari orang tua kepada anak di dalam lingkungan keraton (Paku Buwono IX, 1983). Demikian halnya dengan serat *centhini* yang berisi 26 pengetahuan dalam hidup (Marsono, dkk., 1991). Melalui berbagai serat inilah reproduksi atas pola asuh kemudian dijalankan dari generasi ke generasi (Kuntowijoyo, 1987; Konetjaringrat, 1988:52-53).

Sementara itu di dalam realitas historis, literatur mencatat bagaimana pola asuh berlangsung di dalam lingkungan keraton. Dimulai ketika anak baru lahir. Terdapat kebiasaan di dalam lingkungan keraton agar anak tidak diberikan asi dari ibu kandung. Mereka ini disebut sebagai ibu susu atau dalam bahasa lokal disebut *inyo*. Mereka ini adalah ibu susu yang dipilih secara selektif di antara para perempuan yang mengajukan diri. Pencarian ibu susu dilakukan jauh sebelum anak lahir, dengan cara memberikan pengumuman bagi para perempuan yang sedang menyusui untuk dilakukan tes kesehatan guna menjadi ibu susu bagi para putra raja. Ketika seorang perempuan telah terpilih menjadi ibu susu, ia berhak mendapatkan fasilitas seperti rumah, gaji besar, dan perhiasan. Selain itu, juga mereka selalu mendapatkan menu makanan istimewa karena ibu susu harus cukup gizi. Selama menjadi ibu susu, seorang perempuan akan tinggal di dalam tembok keraton. Setelah berusia 10 bulan, pemberian susu oleh ibu susu dihentikan dan para putra raja kemudian diasuh oleh

*mbok emban* (Hermono, 2014: 52-53).

*Mbok emban* adalah seorang *abdi dalem* perempuan yang bertugas mengasuh dan mendampingi anak sehari-hari. Ia mengajarkan bagaimana beretika sebagai seorang putra raja, mengajarkan bahasa Jawa halus kepada mereka yang dituakan dan dihormati. Penggunaan bahasa Jawa di dalam lingkungan keraton sangat penting karena pelevelan bahasa di dalam kehidupan budaya Jawa sangat ketat (Errington, 1986: 329-353).

*Mbok emban* ini pula yang mempunyai kewajiban untuk mengantarkan putra raja yang ia asuh untuk berangkat ke sekolah dan mendampinginya ketika mereka berada di sekolah. Ketika berada di sekolah, *mbok emban* tidak sendiri ia akan berada di sekolah bersama dengan *mbok mban* lainnya. Sambil menunggu, para *mbok emban* biasanya bermain kartu bersama-sama dengan *mbok emban* lainnya (Hemomo, 2014: 54).

## **DEMOKRATISASI KERATON**

Demokratisasi di dalam kehidupan keraton setidaknya berlangsung sejak Sultan Hamengku Buwono I. Hal itu dibuktikan dengan pemberlakuan bahasa *bagong* untuk mengimbangi bahasa halus yang saat itu berkembang di dalam lingkungan keraton. Bahasa *bagong* adalah bahasa sehari-hari yang mampu menjembatani antara keluarga keraton yang berbahasa halus dengan masyarakat umum (*wong cilik*) yang berbahasa kasar. Harapannya, melalui pemakaian bahasa *bagong* ini, jarak sosial antara keraton dan masyarakat umum dapat terjembatani (Errington, 1982: 89-101).

Pada masa Sultan Hamengku Buwono VII demokratisasi keraton kembali terjadi. Sultan, yang naik tahta seiring dengan menguatnya pemerintahan kolonial melakukan strategi untuk menghadapi kondisi tersebut. Sultan mulai berpikir bahwa pendidikan merupakan satu cara untuk menghadapi pemerintahan kolonial, yang salah satunya membawa modernisasi. Karena itulah, Sultan kemudian

mengirim putra mahkotanya untuk menempuh pendidikan formal di negeri Belanda. Melalui pendidikan, Sultan berpikir bahwa interaksi dengan budaya Eropa akan semakin baik sehingga dihasilkan cara untuk menghadapi modernisasi secara lebih baik pula.

Tampaknya strategi yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono VII tidaklah salah. Terbukti ketika putra mahkota kemudian naik tahta sekalipun belum menyelesaikan pendidikannya di Belanda dan harus menggantikan ayahnya menjadi sultan pada 1921, ia melakukan berbagai kegiatan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Yogyakarta. Apalagi, ketika HB VIII berkuasa merupakan periode ketika nasionalisme mulai tumbuh dalam kehidupan berbangsa. Semangat masyarakat Yogyakarta yang tinggi untuk melakukan perubahan kehidupan didukung sepenuhnya oleh Sultan (Kartodirdjo, 1999; Rixklefs, 2005; Ingelson, 1983).

Strategi yang dilakukan oleh Hamengku Buwono VII kemudian dilanjutkan oleh Hamengku Buwono VIII yang memilih pendidikan formal sebagai satu cara untuk menghadapi modernisasi. Apalagi Residen Yogyakarta memberikan dukungan sepenuhnya dengan keinginan Sultan. Menurut Residen, pendidikan yang ada di Yogyakarta dan dikelola oleh keraton ketika itu tidak cocok lagi bagi putra-putra raja dalam menghadapi modernisasi yang sedang berjalan. Residen mengusulkan agar raja mendatangkan guru khusus, tetapi tidak menggunakan bahasa Belanda. Dalam hal ini, Residen pun menyampaikan pertanggung jawabannya untuk mengawasi jalannya pendidikan mereka, terutama terkait dengan uang jajan yang digunakan oleh para putra raja (van der Wal, 1963: 35).

Dukungan keraton pada pendidikan kemudian terbukti. Sultan tidak saja mendatangkan guru khusus, tetapi juga mengirim putra-putra terbaiknya untuk menempuh pendidikan formal di sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Dorodjatun, misalnya, dikirim untuk menempuh pendidikan formal di *frobel school*, kemudian di

HBS (*Hogere Burger School*). Keduanya merupakan sekolah khusus untuk anak-anak Eropa. Setelah tamat dari HBS, Dorodjatun kemudian dikirimkan ke Belanda untuk menempuh pendidikan indologi (van der Wal, 1963: 35). Selain Dorodjatun, pada tahun 1930an terhitung ada 3 putra Sultan lainnya yang belajar di negeri Belanda. Mereka adalah Tinggarto (Praboeningrat), Raisoelingaskari (Bintoro), dan Ila'oeel Kirami. Selain itu, ada juga 2 orang kemenakan Sultan, yaitu Soekandari dan Pangeran Hadinegoro. Sebagian besar dari mereka belajar di kelas-kelas terakhir sekolah menengah di negeri Belanda, dan setelah itu melanjutkan pendidikan Indologi atau hukum Hindia. Akan tetapi hanya beberapa yang berhasil lulus ketika tahun 1938 Hamengku Buwono VIII memerintahkan mereka untuk pulang seiring dengan meletusnya Perang Dunia Kedua (Poeze, 2008: 288).

Dalam perkembangannya, perhatian Hamengku Buwono VIII terhadap dunia pendidikan tidak hanya ditunjukkan melalui pengiriman para putranya untuk menempuh pendidikan formal di sekolah-sekolah Eropa, tetapi juga memberikan keleluasaan kepada para *abdi dalem* untuk juga menempuh pendidikan di lembaga pendidikan formal. Secara hierarkis, terdapat tiga struktur sosial di dalam keraton, yaitu *sentana dalem*, *abdi dalem*, dan *kawula dalem*. Termasuk di dalam *sentana dalem* adalah para putra/putri raja dan keturunannya. Sementara itu, *abdi dalem* adalah pelaksanaan tugas yang menjalankan perintah raja. *Kawula dalem (wong cilik)* adalah kelompok di luar dua kelompok tersebut. Di dalam struktur hierarkis tersebut, *abdi dalem* memiliki fungsi yang sangat strategis. Mereka inilah penghubung antara *sentana dalem* dengan *kawula dalem*.

Salah satu bentuk perhatian tersebut ditunjukkan oleh Hamengku Buwono VIII melalui penerbitan surat pemberian keleluasaan pada kepada para *abdi dalem* yang tidak dapat melakukan *seba/caos* (menghadap keraton untuk absen dan bekerja) karena sedang menempuh pen-

didikan di *Hollands-Inlandseschool* (HIS) (Senarai kekancingan No. 348). Surat tersebut merupakan realitas yang sangat penting. Dengan pemberian keleluasaan kepada *abdi dalem* untuk tidak melakukan *seba/caos* ketika menempuh pendidikan formal, tidak hanya menunjukkan dukungan Hamengku Buwono VIII terhadap dunia pendidikan tetapi juga toleransi yang besar dari Sultan kepada para pekerja yang bekerja di lingkungan keraton.

Perubahan lainnya yang dilakukan oleh Hamengku Buwono VIII selain melalui dukungan pada institusi pendidikan formal juga melalui penataan kelembagaan. Pada 1934 Hamengku Buwono VIII membentuk Parentah Luhur Keraton yang bertugas untuk mengurus perpustakaan, majalah, dan perhubungan dunia keraton dengan masyarakat luar. Parentah Luhur Keraton ini terdiri dari 2 macam skema pemberian gaji, yaitu mereka yang digaji oleh negara dan mereka yang digaji oleh keraton (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997: 145). Melalui Parentah Luhur Keraton, keterbukaan dunia keraton dengan dunia luar tampak semakin terbuka.

## MENGUBAH POLA ASUH

Seiring dengan dukungan Sultan pada dunia pendidikan, Sultan bersama-sama dengan Residen mulai merancang pengiriman putra-putra raja menempuh pendidikan formal sekaligus tinggal bersama keluarga-keluarga Eropa. Dorodjatun, misalnya, yang saat itu berumur 4 tahun dititipkan kepada keluarga Mulder di Gondokusuman. Mulder adalah seorang kepala *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*. Di dalam keluarga Mulder, Dorodjatun dipanggil dengan sapaan Henkie yang artinya si kecil Henk. Panggilan tersebut sekaligus mempertegas penempatan Dorodjatun sebagai bagian dari keluarga Eropa, karena Henkie merupakan sebuah panggilan kesayangan yang biasa diberikan pada anak-anak Eropa terhormat (Atmakusumah [ed.], 1982; Tim Tempo,

2014: 34-37).

Selain menitipkan kepada keluarga Eropa, para putra raja kemudian juga menempuh pendidikan formal di sekolah-sekolah Belanda yang lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya yang baru. Henkie, misalnya, bersekolah di taman kanak-kanak (*Frobel School*) milik keluarga Juffrouw Willer di Bintaran Kidul. Ia berangkat dan pergi ke sekolah diantar dengan menggunakan kereta keraton dari Gondokusuman. Ketika dewasa Henkie bersekolah ke *Neutrale Europese Lagere School* di Jalan Pakem. Karena jarak sekolah dengan tempat tinggal baru terhitung jauh, Henkie kemudian dipindahkan oleh Sultan untuk tinggal bersama keluarga Cock. Selain Henkie, telah tinggal pula di dalam keluarga Cock kakak-kakak Henkie. Mereka adalah Soerjawidjaja, Soeryobronto, dan Bintoro. Sementara kakak yang lain, yaitu Tinggarto (Prabuningrat) dititipkan pada keluarga Janitz (Tim Tempo, 2014: 34-37).

Setelah lulus dari ELS, Henkie kemudian melanjutkan pendidikan di Semarang untuk masuk ke *Hogere Burgerschool* (HBS) dan kos pada keluarga Voskuil yang merupakan kepala rumah penjara Mlaten di Semarang. Akan tetapi di tempat ini tidaklah lama, karena cuaca di Semarang tidak cocok bagi kesehatan Henkie. Ia kemudian dipindahkan ke HBS Bandung dan tinggal bersama Letnan Kolonel De Boer di Riauwstraat. Setamat dari HBS, Henkie kemudian melanjutkan pendidikan di Belanda dan tinggal pada keluarga Willem Clement Gerrit Hendrik van Mourik Broekman di Wilheminstraat (Tim Tempo, 2014: 37-42).

Dari perjalanan Henkie di atas, tampak bahwa sejak usia 4 tahun hingga 20an, setidaknya ia tidak lagi tinggal di dalam tembok keraton dengan dikelilingi oleh para *abdi dalem* perempuan yang siap melayani para putra raja. Bagi Sultan, penitipan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan transfer budaya Eropa pada para putra raja secara lebih baik. Akan tetapi sayang, pendidikan yang didapat Sri Sultan Hamengku Buwono VIII tidak sampai selesai, sebab ketika

Sultan HB VII mengundurkan diri pada tahun 1920, putra mahkota dipanggil kembali ke keraton untuk dinobatkan menjadi Sultan Hamengku Buwono VIII (Moedjanto, 1994: 21-22; Soemardjan, 1989: 115). Hal ini merupakan perubahan cara pandang terhadap pola asuh yang cukup penting yang dilakukan oleh Hamengku Buwono VIII. Dengan melepaskan para putra menempuh pendidikan Belanda dan belajar budaya secara langsung dari keluarga Belanda berarti memotong garis ketergantungan para putra keraton terhadap pelayanan jasa *abdi dalem* perempuan.

Penitipan ini menurut Hamengku Buwono VIII adalah langkah penting untuk memutus mata rantai pola asuh yang penuh dengan sanjungan dan pemujaan jika para putra raja diasuh oleh para *abdi dalem* perempuan. Selain itu, sultan juga berfikir bahwa penitipan dan pengiriman putra-putra raja ke sekolah Belanda merupakan satu cara untuk memahami budaya Belanda. Karena bagaimanapun interaksi dengan Belanda merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam periode ini (Rama, 2007: 427).

## **MENGEMBANGKAN BUDAYA JAWA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT EROPA**

Sekalipun para putra raja dikirimkan untuk tinggal bersama-sama dengan keluarga Eropa tidak berarti bahwa mereka jauh dari budaya Jawa yang memang harus terus direproduksi di dalam kehidupan keraton. Perhatian Hamengku Buwono VIII terhadap pengembangan budaya Jawa dilakukan melalui berbagai cara. Pada tanggal 6 November 1935, misalnya, Sultan mengizinkan didirikannya Museum Sana Budaya milik *Java Instituut* di sekitar keraton. Museum ini didirikan untuk dapat mengembangkan kesenian dan bacaan buku-buku tentang keraton. Selain mendirikan museum, dalam periode ini juga dibuka sekolah seni kerajinan (*Kunstambachtschool*) beserta asramanya pada tahun 1939. Sekolah ini didirikan

untuk mendidik serta menyempurnakan keahlian orang-orang dewasa yang telah bekerja. Lama kursus adalah 2 tahun dengan membekali siswa belajar pertukangan emas, perak, dan kayu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997: 186).

Selain memberi kesempatan pembukaan museum, Sultan juga terus berusaha meningkatkan pengetahuan para dalang melalui pendirian organisasi dalang. Pada 1925 Sultan mendirikan kursus dalang bernama Habiranda yang merupakan singkatan dari *hamurwani biwara rancangan dalang*. Sultan juga merupakan inisiator kursus ini (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997: 196).

Tidak itu, saja seperti dikatakan oleh Hamengku Buwono VIII ketika ia diangkat menjadi raja. Sekalipun ia didik dalam tradisi Eropa, jiwa Sultan tetap Jawa dan akan terus mengembangkan budaya Jawa. Sultan mengatakan bahwa

*Al heb ik een uitgesproken Westerse opvoeding gehad, toch ben en blijf ik in de allereeste plaats Javaan.* (Tim Kompas, 2012: 17-18).

Artinya: Walau saya telah mengenyam pendidikan Barat, toh pertamanya saya adalah tetap orang Jawa.

Karena tetap mampu menjaga dan mengembangkan ke-Jawaannya di tengah-tengah pendidikan Eropa, tak heran jika Selo Soemardjan menulis tulisan berikut sebagai memoar atas berpulangnya Hamengku Buwono IX yang selama ini didik di dalam lingkungan keluarga Eropa.

*It was a great shock to the people of Indonesia when on the second of October 1988 the news flashed through the air that HB IX had died suddenly. The nation lost a charismatic national leader, a king, and a freedom fighter respected by people in all walks of life.*

## **SIMPULAN**

Anomali pola asuh pada masa Hamengku Buwono VIII terjadi karena latar belakang

pendidikan Sultan yang berpendidikan Eropa serta didukung oleh keinginan Residen. Pilihan antara memotong pola ketergantungan keraton dari *abdi dalem* perempuan/*mbok mban* kemudian menjadi satu kebijakan yang tidak dapat ia tinggalkan. Dalam hal ini, keinginan Sultan untuk memotong rantai ketergantungan dari *abdi dalem* perempuan/*mbok mban* dapat dipahami sebagai semakin kuatnya dominasi politis pemerintahan kolonial pada kehidupan keraton. Akan tetapi, dalam kondisi yang demikian, justru Sultan mampu menguatkan budaya Jawa yang memang harus terus dikembangkan di dalam lingkungan keraton. Karena itu, pendidikan formal dan penitipan anak pada keluarga Eropa merupakan satu cara untuk mempelajari budaya Eropa guna memperkuat budaya Jawa agar terus menguat dalam kehidupan masyarakat Jawa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah (ed.). 1982. *Tahta untuk Rakyat. Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia.
- Condronogoro, Mari S. 1995. *Busana Adat Kraton Yogyakarta 1877-1937: Makna dan Fungsi dalam Berbagai Upacara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud.
- Errington, Joseph. 1982. "Speech in the Royal Presence: Javanese Palace Language". *Indonesia*, 34, October, hlm. hlm. 89-101.
- Hamengku Buwono IX, Pengorbanan Sang Pembela Republik*, 2014. Jakarta: KPG.
- Hermono, Ulli. 2014. *Gusti Noeroel, Streven naar Geluk, Mengejar Kebahagiaan*. Jakarta: Kompas.
- Ingleson, John. 1983. *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme: Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1988. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Marsono, dkk. 1991. *Centhini, Tambangraras-Amongraga*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto, G. 1994. *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Moedjanto, G. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Paku Buwono IX. 1983. *Wulang Dalem Warna-Warni*. Alih bahasa Surachmat dan Supadiyono. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1985. *Kasultanan Yogyakarta: Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik, 1877-1940*. Diterjemahkan oleh E. Suherman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poeze, Harry A. 2008. *Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: KITLV.
- Rama, Ageng Pangestu. 2007. *Kebudayaan Jawa, Ragam Kehidupan Kraton dan Masyarakat di Jawa, 1222-1998*. Yogyakarta: Cahaya Ningrat.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Ricklefs, M.C. 1974. *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java*. London: Oxford University Press.
- Rouffaer, G.P. 1931. *Vorstenlanden, Adatrechtbundel XXXIV, 'S Gravenhage*. *Senarai Kekancingan No. 348*. Arsip Keraton Yogyakarta.
- Soemardjan, Selo. 1978. "The Kraton in the Javanese Social Structure", dalam Harjadi Soebadio dan Caroline du Marchie Sarvaas (eds.). *Dynamics of Indonesian History*. Amsterdam: North Holland.
- Soemardjan, Selo. 1989. "In Memoriam: Hamengku Buwono IX, Sultan of Yogyakarta, 1912-1988." *Indonesia*, 47, April, hlm. 115.
- Soeratman, Darsiti. 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta, 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Sukmawati. 2004. "Gaya Busana di Kraton

- Yogyakarta pada Tahun 1877-1939.”  
*Skripsi*. Jurusan Sejarah FIB Universitas  
Gadjah Mada Yogyakarta.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 200. *Sedjarah  
Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta  
1880-1930*. Yogyakarta: Yayasan untuk  
Indonesia.
- Sutjipto, F.A. 1978. *Struktur Birokrasi Mataram*.  
Yogyakarta: Jurusan Sejarah, Fakultas  
Sastra dan Kebudayaan UGM.
- Tim Kompas. 2012. *100 tahun Sultan  
Hamengku Buwono IX, Sepanjang Hayat  
Bersama Rakyat*, Jakarta: Kompas.
- van der Wal, S.L. 1963. *Het Onderwijsbeleid in  
Nederland Indie*. Groningen: J.B.  
Wolters.
- Wicaksono, Dwi Hadiyanto. 1999. “Tari  
Bedhaya Semang Sebuah Ritus di Kra-  
ton Ngayogyakarta Hadiningrat (1755-  
1921)”. *Skripsi*. Fakultas Sastra Univer-  
sitas Gadjah Mada Yogyakarta.